

BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait dengan strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan partisipasi pemilih Pilkada di masa Pandemi Covid-19 yang dianalisis menggunakan teori Chandler tentang tiga tahapan penyusunan strategi meliputi formulasi dan sasaran jangka panjang, pemilihan tindakan dan alokasi sumber daya. Dapat disimpulkan bahwa terwujudnya Pilkada yang demokratis tidak lepas dari penyelenggara Pilkada itu sendiri yaitu KPU Kota Bandar Lampung. Pertama tahapan formulasi dan sasaran jangka panjang untuk mensosialisasikan Pilkada serentak tahun 2020 sesuai dengan teori Chandler dalam tahapan penyusunan strategi dapat dilihat dengan jelas landasan hukum serta kejelasan strategi yang digunakan serta tujuan yang akan dicapai. Kedua Pemilihan tindakan, pada tahap ini KPU Kota Bandar Lampung sudah berupaya secara maksimal melakukan sosialisasi seperti KPU *goes to School* and Pesantren, Relawan Demokrasi, lomba fotografi dan pameran, pembentukan Rumah Pintar Pemilih, Pendidikan Pemilih berbasis kelurahan, dan sosialisasi secara daring melalui berbagai platform ke beberapa segmen masyarakat dengan berbagai metode yaitu yang digunakan. Sosialisasi yang dilakukan relawan demokrasi dinilai sudah cukup baik dibuktikan dengan naiknya angka partisipasi Pilkada sebesar 3% dari tahun sebelumnya. Relawan demokrasi fokus pada penyampaian waktu pemilihan, pengenalan pasangan calon, dan tata

cara mencoblos dengan benar. Sehingga, hal tersebut menjadi salah satu faktor naiknya angka partisipasi. Namun disisi lain belum maksimalnya relawan demokrasi karena belum bisa membangun kesadaran masyarakat sepenuhnya serta adanya keterbatasan pengetahuan dan teknis pelaksanaannya.

Berdasarkan yang dirumuskan bahwa pemilihan tindakan sesuai dengan teori Chandler telah terlaksana dengan baik dalam artian sosialisasi Pilkada mengalami peningkatan partisipasi dari tahun sebelumnya 2015 66% naik menjadi 69,13% tahun 2020 meskipun belum mencapai target nasional yaitu sebesar 77%. Hal ini dikarenakan terdapat keterbatasan ruang dan waktu interaksi antar penyelenggara pemilu dengan masyarakat. Ketiga tahap alokasi sumber daya, upaya meningkatkan sumber daya manusia KPU Kota Bandar Lampung telah memberikan Bimtek, namun terkhusus mengenai relawan demokrasi belum sepenuhnya dikatakan baik karena sebagian dari mereka tidak paham terhadap tugas dan fungsinya, akan tetapi dalam hal ini KPU Kota Bandar Lampung berusaha untuk meningkatkan kualitas kinerja mereka dengan memberikan bimbingan teknis dan breafing meskipun tidak dilakukan secara rutin.

1.2. Saran

- 1) Pilkada pada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 atau bencana non alam menjadi bahan pembelajaran untuk pemilu berikutnya bahwa perlu ada kesiapan regulasi yang mengatur pemilu di masa bencana non alam. Pilkada 2020 balam menunjukkan adanya beberapa perubahan pelayanan KPU Kota Bandar Lampung dalam sosialisasi karena hambatan bencana non alam.

- 2) Pilkada tahun 2020 membuktikan bahwa partisipasi politik masih bisa ditingkatkan dengan strategi yang tepat. Hal ini terbukti ketika Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020 dominan menggunakan sosialisasi secara daring dan adanya kepercayaan kepada penyelenggara Pemilu yang mampu menyelenggarakan Pilkada dengan aman terbukti mampu mendorong tingkat partisipasi politik.
- 3) Relawan demokrasi KPU Kota Bandar Lampung dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan angka partisipasi Pilkada terbukti kenaikan sebesar 3% dari tahun sebelumnya, sehingga dengan ini KPU Kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Lampung dapat mencontoh atau mereplikasikan strategi yang dilakukan KPU Kota Bandar Lampung.
- 4) Peneliti yang memiliki minat terhadap isu Pilkada perlu menindaklanjuti aspek (Relawan demokrasi, manajemen SDM/dsb).

1.3. Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam hasil penelitian yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

- 1) Keterbatasan waktu pelaksanaan penelitian.
- 2) Lingkup penelitian cukup terbatas (KPU Kota Bandar Lampung) sehingga tidak bisa menjadi kesimpulan yang lebih umum. Keterbatasan hasil penelitian. Pilkada 2020 sulit untuk digeneralisasikan pada situasi politik yang lebih luas. Setiap daerah memiliki kondisi dan konteks politik yang berbeda-beda